

PELUANG EKONOMI ISLAM DI ERA POST-KAPITALISME

Muhamad Mustaqim

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Uni Eropa akhir-akhir ini menjadi sebuah indikator bahwa sistem ekonomi kapitalistik mempunyai titik kelemahan yang signifikan. Meskipun sistem kapitalisme selalu melakukan penyesuaian dan perubahan, namun secara umum kapitalisme yang saat ini dianut oleh banyak Negara ini juga mempunyai anomali, yang siap mengantarkan Negara penganutnya menuju krisis. Dan nyatanya, krisis ekonomi ini bukan hanya terjadi di Eropa, Amerika Serikat sebagai Negara kiblat kapitalisme, pada tahun 2008 pernah mengalami hal yang sama. Bahkan sampai saat ini, perekonomian Amerika pasca krisis belum bisa bangkit dan pulih secara sempurna.

Pada sisi yang lain, ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di Indonesia, keberadaan sistem ekonomi syariah sedang mengalami pertumbuhan yang tajam, seperti jamur di musim penghujan. Maraknya lembaga perekonomian dan keuangan yang bercorak islam (syariah) menjadi satu indikator akan kebangkitan ekonomi islam. Seperti menjadi trend, keberadaan lembaga keuangan syariah ini, mulai Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sampai koperasi keuangan syariah hampir tersebar di berbagai penjuru daerah. Bahkan beberapa bank dan lembaga keuangan konvensional melakukan diversifikasi produk dalam bentuk syariah.

Di sinilah kiranya peluang ekonomi Islam sebagai sebuah alternative terhadap anomali-anomali yang terjadi pada sistem kapitalisme. Ekonomi Islam secara umum dapat dipahami sebagai upaya merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang seirama dengan maqashid (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu dan hak sosial. Jika pemahaman ini disepakati, maka ekonomi Islam akan mampu menjadi sebuah sistem ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai suci ilahiyah. Karakteristik islam yang membatasi penumpukan kekayaan secara mutlak, serta meniscayakan distribusi ekonomi secara proporsional, dengan dilandasi pada semangat mengabdikan (ibadah) maka akan semakin mendekatkan pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pada segi praktis, ekonomi Islam akan mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh sistem ekonomi kapitalistik, seperti persoalan pemerataan, kegiatan ekonomi yang fair, nilai religius dalam ekonomi

berbenturan, yakni barat dan Islam.⁶¹³ Di sini, Islam dianggap sebagai peradaban yang akan bergesekan dengan Barat. Jika hal ini dihubungkan dengan tesis Fukuyama, maka Barat-kapitalisme yang telah memenangkan perang dingin, akan berhadapan dengan Islam yang saat ini sedang di abad kebangkitan. Pertarungan Barat-Islam boleh jadi telah kita jumpai dalam dua dasawarsa terakhir ini. Isu terorisme yang kemudian dilabelkan pada Islam oleh Barat, ditambah dengan konflik Barat dengan Negara-negara islam di Timur Tengah setidaknya menjadi penanda ketegangan ini.

Namun dalam bidang ekonomi, dominasi dan kemenangan kapitalisme tampaknya memasuki masa-masa suram. Beberapa krisis yang akhir-akhir ini melanda Negara-negara di Amerika dan Eropa, yang nota bene merupakan Negara penyangga kapitalisme menjadi bukti tetapi ideologi ekonomi kapitalis tidak sehebat yang diyakini selama ini. Krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008 lalu misalnya, betapa Amerika Serikat “menghianati” apa yang menjadi doktrin utama kapitalisme, menyingkirkan peran Negara. Dalam kasus krisis Amerika Serikat tersebut, Amerika justru mengeluarkan kebijakan yang kontradiksi dengan teori dasar kapitalisme, yakni dengan adanya campur tangan Negara dalam penyelesaian krisis. Padahal intervensi Negara dalam ekonomi merupakan hal yang paling “haram” dalam teori kapitalisme klasik maupun neo-kapitalisme.

Dan yang paling akhir adalah krisis yang terjadi di Uni Eropa. Persekutuan Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni-Eropa ini pada awalnya dipercayai sebagai kekuatan ekonomi dunia yang paling kokoh. Bahkan mata uang Uero yang menjadi mata uang bersama Uni-eropa pernah menguat dan bersaing ketat dengan Dollar Amerika. Namun awal 2010 kemarin menjadi awal petaka bagi ekonomi eropa. Krisis Yunani, yang diikuti oleh Negara-negara eropa lainnya terutama Irlandia dan Portugal menjadi awal the great depression bagi kapitalisme Eropa, meskipun memang tak seheboh depresi besar tahun 1930-an. Dalam kasus Yunani misalnya, utang Negara lebih besar dari GDP (*Gross Domestic Product*) serta terjadi defisit Negara, yakni pengeluaran Negara lebih besar daripada pendapatan Negara.

Ada beberapa analisis tentang penyebab krisis Yunani ini. Dan salah satu yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia pelaku ekonomi. Konon dalam menghadapi krisis, pemerintah menyewa bank investasi untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan angka sesungguhnya dari jumlah utang pemerintah. Pemerintah Yunani juga diketahui telah mengutak atik data-data statistik ekonomi makro, sehingga kondisi perekonomian mereka tampak normal dan stabil. Namun pada akhirnya, kecurangan tidak dapat ditutupi. Salah satu penyebab utama dari defisit tersebut adalah banyaknya kasus penggelapan pajak, yang diperkirakan telah merugikan negara hingga US\$ 20 milyar per tahun.⁶¹⁴ Ini berarti bahwa sistem kapitalisme tidak mampu

⁶¹³ *Ibid.*, 9

⁶¹⁴ Harian Republika, 22 Juni 2012.

baru. Untuk mengatur sistem moneter internasional, di bentuklah IMF (*International Monetary Fund*). Untuk mendanai proyek-proyek pembangunan negara dunia ketiga di bentuklah WB (*World Bank*), dengan hidden agenda, menciptakan ketergantungan negara bekas jajahan. Sedangkan untuk mengatur lalu lintas perdagangan multilateral, dicanangkan GATT (*General Agreement on Tarrif and Trade*). Semuanya bertujuan untuk mengendalikan arus ekonomui dunia untuk melakukan hegemoni terhadap dunia ketiga, dengan slogan Pembangunan.

Doktrin Pembangunanisme pada era ini boleh jadi merupakan trend dunia yang tak terbantahkan. Di saat negara- negara yang baru merdeka memerlukan pembangunan yang intens, organisasi dunia ini datang dengan menawarkan bantuan yang menggiurkan, meskipun sebenarnya sangat mematikan.

Di Indonesia sendiri, Pembangunan menjadi sebuah ideologi bangsa yang menghujam kuat di jiwa para birokrat, khususnya masa orde baru. Dengan dalih *trickle down effec*, efek menentes ke bawah, pembangunan seakan-akan satu-satunya jalan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari hegemoni teori barat yang di tancapkan ke negara dunia ketiga. Sebagai contoh, Rostow dengan teori pembangunannya yang terkenal dengan *the five-stage scheme*. Menurutny semua masyarakat pada dasarnya merupakan masyarakat “tradisional”. Tradional dalam hal ini dianggapnya sebagai suatu masalah. Untuk itu, tradisional harus di rubah menuju modern. Untuk menuju ke masyarakat modern, developmen mutlak di perlukan. Sehingga, pembangunan merupakan prasyarat menuju masyarakat modern.

Periode ketiga, era globalisasi yang terjadi menjelang abad kedua puluh satu. Era ini ditandai dengan proses liberalisasi di segala bidang. Liberalisasi ini sesungguhnya dipaksakan melalui *Structural Adjusment Program* (SAP), yakni persetujuan perdagangan yang di sepakati melalui lembaga dunia WTO (*World Trade Organization*). Melalui WTO ini, arus perdagangan dunia dikendalikan oleh negara-negara kaya yang menanamkan modalnya di WTO. Dan ironisnya, mekanisme pengambilan keputusan WTO dilakukan melalui pengambilan suara anggota, yang didasarkan pada besarnya modal yang di tanamkan.

C. Hegemoni Kapitalisme

Jika kita disuruh memilih, antara hidup kaya atau miskin, sepertinya setiap orang aakn memilih untuk hidup kaya, mewah dan harta yang berlimpah. Pun demikian juga, kebanyakan orang akan memilih adanya kebebasan individu yang tak terbatas oleh aturan aturan yang menjerat. Kecenderungan inilah yang oleh Antonio gramsci disebut sebagai Hegemoni. Hegemoni merupakan upaya pemaksaan (*coercion*) suatu kelompok atas kelompok yang lain, dengan cara persetujuan kelompok tertindas melalui system yang ada. Dengan kata lain, hegemoni merupakan sebuah upaya penguasa global untuk

manufaktur untuk pasar dunia. Negara *core* pada umumnya adalah *Northwest* Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia. Kedua negara pinggiran (*periferi*), terdiri dari negara-negara yang memiliki proses produksi yang sederhana. Biasanya produk-produk negara periferi ikut menyumbang proses akumulasi kapital di negara-negara *core* karena dagang memerlukan pertukaran-pertukaran yang tidak seimbang. Kontrol buruh juga dijalankan dengan kekerasan, dengan struktur negara yang lemah.

Ketiga, Semi Periferi, mempunyai kompleksitas kegiatan ekonomi, modus kontrol buruh, mesin negara yang kuat dan sebagainya. Fungsi politik periferi adalah sebagai *buffer zone* antara dua kekuatan yang saling berlawanan. Secara historis, semi periferi terdiri dari negara-negara yang sedang naik atau turun dalam system dunia.

Hegemoni alat-alat produksi dalam hal ini dilakukan oleh negara *core* kepada negara-negara semi-periferi maupun periferi. Ketergantungan terhadap alat komunikasi dan informasi yang perkembangannya dalam hitungan detik ini menjadikan negara periferi maupun semi periferi, mau tidak mau berusaha mengikuti perkembangan pasar, dengan melakukan ikatan kerja dengan negara inti. Kalau sudah seperti ini, tak pelak terjadi sebuah ketergantungan, yang pada akhirnya mampu mempengaruhi kegiatan politik, ekonomi maupun budaya di negara baik periferi maupun semi periferi. Pasar bebas dalam hal ini menjadi pupuk subur proses hegemoni.

Dengan doktrin persaingan sehat dan efisiensi, negara-negara miskin dan berkembang mencoba dihegemoni dengan berbagai barang yang murah dan berkualitas. Inilah peluang bagi Perusahaan global untuk menancapkan kuku hegemoninya dalam membentuk budaya dan pola hidup masyarakat. Dengan barang yang di ciptakan, pola hidup masyarakat di bangun dengan perlahan. Pola konsumeris adalah bagian dari target proses hegemoni. Jika masyarakat sudah mempunyai pola konsumerisme, maka pengendalian melalui barang-barang kebutuhan atas kesadaran dan pola hidup menjadi efektif.

Sampai sini peran negara kemudian turun pada derajat yang sangat rendah. Negara dibuat diam seribu bahasa atas pola liberalisasi pasar. Kuasa negara yang sebenarnya mempunyai kekuatan memaksa mencoba digeser dengan dalih-dalih demokrasi, liberalisasi dan modernisasi. Hegemoni pasar atas negara dan masyarakat adalah bentruk kekuasaan negara atau kelompok dominan untuk membentuk kesadaran kelompok subordinat.

Sebuah fakta menarik, sebagaimana yang pernah diungkap oleh Norena Herzt bahwa televisi merupakan wahana yang ampuh untuk melakukan proses hegemoni. Lebih tegas Herzt mengatakan bahwa revolusi tidak akan disiarkan melalui televisi. Karena Televisi hanya akan melayani kekuatan-kekuatan pemodal. Sedangkan segala aktifitas atau apapun yang kontra produktif dengan kepentingan kapitalis, sudah barang tentu tidak menjadi mitra kerjanya. Dalam hal ini, Herzt mencontohkan bahwa bagaimana

anggotanya untuk mentaati apa yang menjadi konsensus bersama. dalam hal ini, Indonesia, sebuah Negara bangsa yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya, mempunyai tekad bersama untuk mampu mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyatnya. Namun “keperkasaaan“ Negara sebagaimana yang selama ini ada, saat ini akan mengalami pergeseran yang cukup krusial. Oleh globalisasi, Negara mencoba dikebiri oleh sebuah pisau yang bernama pasar.

Saat semua asset Negara diambil alih oleh pihak swasta inilah kredibilitas Negara dipertanyakan. Sayangnya, pihak swasta dalam hal ini bukanlah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh warga negaranya. Namun dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan raksasa global, yang beroperasi di hampir seluruh penjuru dunia. Perusahaan tersebut adalah TNC (*Trans National Corporation*) atau MNC (*Multi National Corporation*). Perusahaan inilah yang mengambil alih secara diam-diam (*silent take over*) semua milik Negara. Inilah dunia baru yang segera – dan bahkan sudah – dimulai. Inilah dunia dimana kekayaan perusahaan menyerap habis kekayaan Negara.⁶¹⁸

E. Depresi ekonomi dan Post-Kapitalisme

Kritik terhadap kapitalisme sejak awal sudah diungkapkan oleh tokoh sosialisme, Karl Marx. Marx meramalkan bahwa kapitalisme pada saatnya nanti akan mengalami keruntuhan secara alamiah. Indikasinya adalah karena akumulasi modal yang tanpa batas akan melahirkan kelas sosial yang saling bertentangan. Konflik antar kelas bojuis dan kelas ploretar inilah yang oleh Marx diprediksi akan melahirkan sebuah revolusi sosial.⁶¹⁹ Revolusi ini yang menjadi tanda keruntuhan kapitalisme, di mana kelas sosial musnah.

Meskipun ramalan marx ini tidak terbukti benar seratus persen, namun perjuangan kelas buruh telah member ambil bagi revolusi bolsevik di Rusia. Perjuangan kaum proletar dalam menghilangkan kelas sosial menjadi tonggak kejayaan ideologi sosialisme-komunisme di Rusia.

Selanjutnya, sejarah juga mencatat bahwa kapitalisme juga pernah mengalami masa keterpurukan yang sangat dasyat. *Great depression* (depresi besar) ekonomi pernah melanda Amerika, yang juga berdampak bagi ekonomi dunia secara umum. Peristiwa kehancuran bursa tersebut juga dikenal dalam beberapa tahapan yang dikenal dengan julukan Black Thursday (Kamis Hitam) yang merupakan awal terjadinya keruntuhan pada bursa. Walaupun para ahli ekonomi dan para ahli sejarah tidak sependapat atas peran kehancuran bursa ini terhadap kejatuhan ekonomi yang terjadi

⁶¹⁸ Norena Herzt, *op.cit*, 34.

⁶¹⁹ Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 113.

F. Ekonomi Islam, Sebuah Alternatif Lain

Jika Margaret Thatcher pernah mengatakan” *There Is No Alternatif*” (TINA) maka kita pun sebenarnya bisa pula mengatakan “*There Is Many Alternatif*” (TIMA). Ekonomi Islam adalah salah satu alternatif atas ketimpangan sistem kapitalisme global. Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang universal, maka ekonomi Islam akan mampu menjadikan wajah pasar yang ramah dan humanis. Secara etimologi, ekonomi Islam terdiri dari dua suku kata, yakni *ekonomi* dan *Islam*. Kata ekonomi dapat diartikan sebagai segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya; pengaturan rumah tangga. Sedangkan term Islam berarti: damai, tenteram; agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan kitab suci Al-Qur’an.⁶²¹

Secara mudah ekonomi Islam dapat diartikan sebagai segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya yang dilakukan dengan cara yang teratur, berdasarkan pandangan Islam. Ekonomi Islam dibangun di atas landasan yang kokoh yang merupakan warisan yang tak ternilai sebagai wasiat utama bagi umat Islam yang tidak mungkin manusia akan tersesat selamanya selama berpegang kepada dua wasiat itu yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

Mengenai pemahaman tentang Ekonomi Islam, setidaknya ada tiga penafsiran tentang istilah Ekonomi Islam.⁶²² *Pertama*, yang dimaksud adalah “ilmu ekonomi” yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Kalau ini yang dimaksud, maka akan timbul kesan bahwa ajaran Islam itu mempunyai pengertian yang tersendiri mengenai apa itu ekonomi. Dalam hal ini, ada beberapa definisi mengenai ekonomi islam yang disampaikan oleh para pakar. Menurut Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut M.M. Metwally, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas.

Umar Chapra mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqashid (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.

Penafsiran *kedua*, ekonomi Islam dipandang sebagai “sistem ekonomi” (Islam). Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu

⁶²¹ Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaja: Arkola, 1994)

⁶²² Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), 4.

tujuan jangka panjang (akherat) dan jangka pendek (dunia) menjadi orientasi yang selalu melekat pada kegiatan ekonomi.

G. Membangun Ekonomi Islam yang Humanis

Melihat dominasi kapitalis yang hari ini sangat kuat, maka ekonomi Islam diharapkan mampu menjadi konter terhadap hegemoni tersebut. Adalah Antonio Gramsci yang menawarkan sebuah konsep untuk melakukan konter terhadap hegemoni (*counter hegemony*). Bagi Gramsci, hegemoni harus dilawan dengan upaya penyadaran akan hegemoni kultural dan keterpesonaan terhadap hegemoni kapitalis. Konter hegemoni akan terwujud jika ada para intelektual yang mengakar pada basis masyarakat, yang telah terhegemoni.⁶²⁵ Dalam hal ini, ekonomi Islam merupakan perangkat intelektual yang didasarkan sebagai antitesis terhadap prinsip ekonomi kapitalis yang timpang.

Beberapa prinsip Ekonomi Islam, yang diharapkan sebagai *counter* hegemoni tersebut diantaranya adalah:

1. Prinsip amanah.

Islam menganggap berbagai jenis sumber daya yang ada merupakan pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kegiatan tersebut kelak akan dipertanggung-jawabkannya di akhirat.

Prinsip ini tidak diakui dalam system kapitalis. Tidak ada “Tuhan dan akherat” dalam urusan dunia. Mereka menganggap bahwa akherat itu tidak ada, dunia hanya akan berakhir ketika mereka mati. Sehingga kegiatan ekonomi bagi kapitalis tidak lain adalah pemenuan kebutuhan dunia.

2. Prinsip kepemilikan terbatas.

Islam mengakui kepemilikan individu dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu dalam hal ini dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Selain itu, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

Hal ini berbeda dengan prinsip kapitalis yang individualistik. Mereka menganggap bahwa apa yang dimiliki merupakan kepunyaan mutlak, yang didapatkannya dari hasil usaha. Sehingga, tidak ada tanggung jawab moral untuk

⁶²⁵ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (terj) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 34.

